Pencalonan Figur Nonkader dalam Pilkada

Jawa Pos, Rabu 24 Maret 2010

Oleh: Biyanto

ADA fenomena menarik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan diselenggarakan di 18 kabupaten/kota di Jatim sepanjang 2010. Fenomena itu adalah munculnya banyak calon nonkader yang diusung partai politik (parpol) atau gabungan parpol. Salah satunya, pasangan calon wali kota (cawali) dan calon wakil wali kota (cawawali) yang bakal running dalam pilwali Surabaya. Sejauh ini, setidaknya terdapat lima pasangan cawali dan cawawali. Yakni, Tri Rismaharini-Bambang D.H. (PDIP), Arif Afandi-Adies Kadir (Demokrat dan Golkar), Bagio Fandi Sutadi-Mazlan Mansyur (PKB dan Gerindra), Fandi Utomo-Yulius Bustomi (PKS, PDS, PKNU, dan PPP), serta Fitra Djaja-Naen Soeryono (independen).

Jika ditelisik lebih jauh, dapat dikatakan tidak semua pasangan calon yang diberangkatkan oleh parpol atau gabungan parpol tersebut merupakan kader partai pengusung. Misalnya Tri Rismaharini yang diusung PDIP. Selama ini, Tri Rismaharini lebih dikenal sebagai profesional dan birokrat yang berkarir cemerlang. Sebelum mencalonkan diri, dia adalah pejabat karir yang sangat sukses menakhodai Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Balitbang, dan Bappeko Surabaya. Demikian halnya dengan Bagio Fandi Sutadi (Pak Tadi), jelas bukan kader PKB dan Gerindra. Pak Tadi adalah pejabat yang memulai karir dari bawah dengan jabatan terakhir sebagai asisten wali kota Surabaya.

Ada juga nama Fandi Utomo yang menjadi aktivis Partai Demokrat, tetapi diusung gabungan parpol lain. Selain aktivis partai, mantan tim pemenangan Susilo Bambang Yudhoyono di Surabaya itu dikenal sebagai pengusaha sukses. Bahkan, keberhasilan Fandi Utomo menyandingkan PKS, PKNU, dan PPP dengan PDS dapat dianggap sebagai capaian luar biasa. Sebab, gabungan parpol pengusung pasangan Fandi Utomo-Yulius Bustomi sangat pluralis. Ada perbedaan ideologis yang sangat menonjol di antara gabungan parpol pengusung. Catatan khusus layak diberikan kepada PKS yang mau bergabung dengan PDS untuk mengusung pasangan calon nonkader. Bukan hanya publik yang dibuat terkejut. Kader dan simpatisan PKS pun tidak pernah memperkirakan sebelumnya. Tidak mengherankan, pilihan politik PKS itu dianggap aneh. Apalagi, terdengar suara miring yang menyatakan bahwa pilihan tersebut sesungguhnya tidak gratis. Jika kabar itu benar, tentu saja tabiat politik aktivis PKS sangat tidak sesuai dengan citra yang selama ini ditampilkan di depan publik.

Sebelumnya, PKS menyosialisasikan Yulyani, kader terbaik dan anggota DPRD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya periode 2004-2009, untuk diusung sebagai cawali atau cawawali. Tim pemenangan Yulyani pun telah dibentuk dan bekerja. Tetapi, tiba-tiba elite PKS mengalihkan dukungan kepada Fandi Utomo-Yulius Bustomi. Kader dan simpatisan PKS yang terkenal militan juga dibuat terkejut. Bahkan, hingga kini belum ada penjelasan yang memuaskan mengenai pilihan politik PKS. Padahal, dalam Pemilu 2009 PKS merupakan partai pemenang ketiga bersama PKB dan Golkar. Mereka sama-sama memperoleh lima kursi di DPRD Surabaya. Fenomena pencalonan figur nonkader dalam pilkada patut mendapatkan penjelasan. Menurut saya, ada beberapa alasan yang kiranya dapat menjelaskan ketertarikan parpol atau gabungan parpol mengusung calon nonkader. Pertama, dalam era pilkada langsung oleh rakyat, memang dibutuhkan figur yang populer. Karena itu, sebelum membuat keputusan, partai senantiasa mengadakan survei dulu mengenai popularitas dan elektabilitas calon. Figur yang disurvei biasanya merupakan tokoh yang populer atau mereka yang mendaftar melalui parpol tersebut. Berdasar hasil survei itulah, calon diputuskan. Karena parpol biasanya membuka pendaftaran secara terbuka, banyak calon nonkader yang mendaftar. Dengan demikian, sangat dimungkinkan hasil survei dimenangi calon nonkader yang memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi. Dengan mengandalkan figur yang memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi, tidak peduli kader atau nonkader, peluang memenangi pilkada akan terbuka.

Kedua, harus diakui parpol sering tidak mempersiapkan secara serius kader terbaiknya untuk maju dalam pilkada. Bisa juga dikatakan parpol sesungguhnya kekurangan kader yang berkualitas, populer, dan memiliki elektabilitas tinggi. Kondisi itu jelas harus menjadi otokritik bagi parpol dalam menyelenggarakan kaderisasi. Di samping itu, minimnya kader berkualitas disebabkan buruknya sistem perekrutan keanggotaan dalam parpol. Faktor tersebut penting menjadi perhatian. Sebab, sering kader partai yang memiliki loyalitas tinggi, kredibel, dan dukungan basis massa riil harus kalah bersaing dengan calon baru yang punya kekuatan finansial. Fenomena itu dapat diamati dalam setiap pemilihan ketua partai, rekrutmen calon anggota legislatif, dan pencalonan kepala daerah. Dalam beberapa even politik tersebut, sering terjadi marginalisasi kader yang telah berkeringat, menunjukkan loyalitas, bahkan berdarah-darah dalam memperjuangkan parpol. Kader itu dipaksa mengalah kepada pendatang baru yang belum maksimal berjuang, tetapi memiliki modal dan kedekatan dengan elite parpol.

Ketiga, pilihan parpol terhadap figur nonkader sering didasarkan pada kalkulasi untung rugi. Tegasnya, ada hitung-hitungan ekonomi yang melatarbelakangi pilihan parpol ketika mengusung calon dalam pilkada. Maka, tawar-menawar harga antara calon dan parpol pengusung dan pendukung menjadi fenomena yang lumrah. Para calon jelas membutuhkan parpol sebagai kendaraan politik untuk dapat berkompetisi dalam pilkada. Parpol pengusung pun tidak akan memberikan kendaraan secara gratis. Dengan dalih membesarkan partai, biaya sosialisasi, biaya logistik, dan kepentingan tim pemenangan, parpol biasanya mengajukan penawaran harga. Jadilah para calon itu ibarat sapi perahan parpol. Akibat budaya politik yang high cost tersebut, para calon harus menyiapkan modal yang besar untuk maju dalam pilkada. Barangkali merasa telah mengeluarkan modal, yang ada dalam benak pikiran calon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah mengembalikan modal secepatnya ketika memenangi pilkada. Dari situlah praktik penyelewengan jabatan itu dimulai. Maka, tidak mengherankan upaya pemberantasan budaya korupsi sering harus menghadapi jalan berliku nan terjal.

Dari beberapa alasan tersebut, tampaknya, penjelasan yang begitu dominan untuk dipahami publik adalah argumentasi ketiga. Karena itu, tidak mengherankan jika kemudian publik pun mengenal istilah mahar politik, ongkos politik, money politics, bahkan sedekah politik. Intinya, fenomena pencalonan figur nonkader itu sangat berkaitan dengan masalah finansial. Apalagi, tabiat di kalangan politisi selalu menekankan politik kepentingan. Juga ada guyonan di kalangan politisi bahwa perbedaan pendapat adalah hal biasa. Yang tidak boleh terjadi adalah perbedaan pendapatan.

Budaya tersebut jelas selaras dengan doktrin politik yang menyatakan, "Who gets what, when, and how." Pernyataan itu menjelaskan bahwa politik berkaitan dengan persoalan mengenai siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana caranya. Dalam politik juga dikenal pernyataan tidak ada musuh yang abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Artinya, jika kepentingan sudah ketemu, segala persoalan dapat dibicarakan. (*/mik)

Biyanto, Dosen Prodi Politik Islam IAIN Sunan Ampel

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id